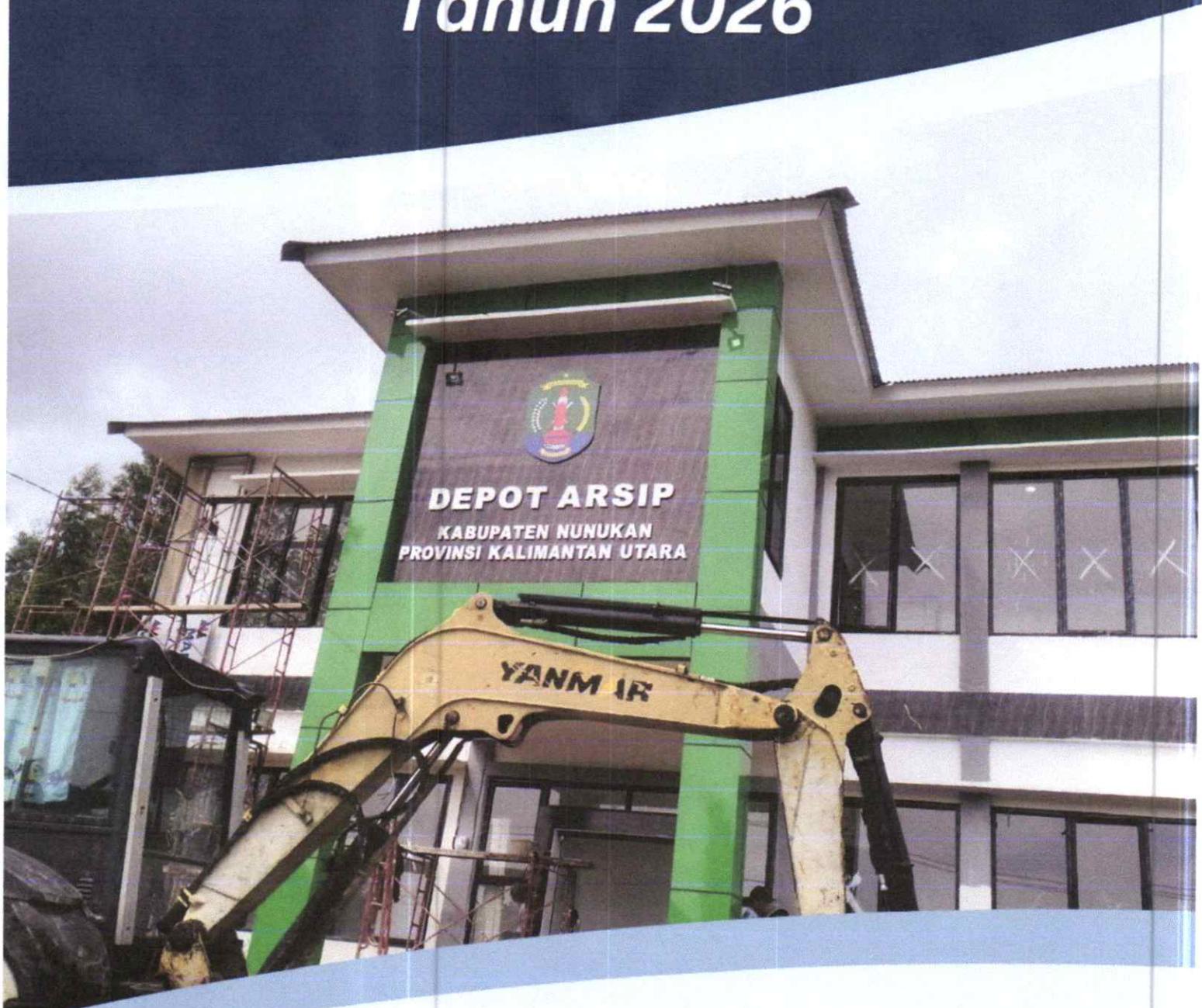




# Rencana Kerja

# **RENJA**

## *Tahun 2026*



**DPUPR KAB NUNUKAN**

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dapat diselesaikan. Renja ini merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan mengampu urusan yakni Urusan Pelayanan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan dan merupakan acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 dan sekaligus mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian Tahun 2027. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi wujud pertanggungjawaban Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas.



Nunukan, 01 Juli 2025  
Kepala Dinas,

**ABDI JAUHARI N., ST.**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP.19780430 200112 1 003

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang. ....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan. ....	11
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....</b>	<b>13</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 .....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2023 .....	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 .....	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	62
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>63</b>
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional. ....	63
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan .....	68
3.3 Program dan Kegiatan .....	76
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..</b>	<b>84</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>114</b>



# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 LATAR BELAKANG

Proses perencanaan yang baik merupakan awal bagi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menjadi tahap awal dalam proses pembangunan, yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan perencanaan yang baik diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan



Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Salah satu turunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja (RENJA) PD.

Dokumen Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) PD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja PD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan perencanaan tahun ketiga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Perencanaan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, khususnya pada Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya. Oleh karena itu dalam penyusunan RENJA DPUPR Kabupaten Nunukan Tahun 2026 harus selaras dengan kedua dokumen perencanaan tersebut dan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan turunannya.

RENJA PD merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. RENJA PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:



1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RENSTRA PD sesuai arahan operasional dalam RKPD;
2. Renja merupakan acuan untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang merupakan input/masukan dalam penyusunan RAPBD;
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD tahun sebelumnya dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal perangkat daerah. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan Renja PD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada Rancangan Awal Renja PD;
2. Rumusan program/kegiatan dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;



3. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana.

Pada dasarnya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, antara lain bertujuan untuk (1) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan (2) Meningkatkan pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal. Terkait dengan hal tersebut perlu disusun suatu perencanaan program/kegiatan yang konseptual dan realistis yang mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional, Provinsi maupun kabupaten.

Mengingat beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu disusun RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026. Penyusunan RENJA DPUPR Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menjadi dasar yang objektif, efisien dan tepat sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan orientasi dan komitmen target serta sasaran masa depan pada masing-masing program/ kegiatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2021 – 2026 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera”**. Dukungan kepala daerah untuk pembangunan infrastruktur



wilayah telah ditetapkan dalam Visi Misi Bupati Nunukan Periode 2021-2026 yaitu pada Misi ke-2: **“Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi”**.

Berikut ini disampaikan Alur Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya:

**KETERKAITAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA**



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan dalam menyusun Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Renana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39);
22. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan.

Disamping Peraturan-peraturan tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan juga senantiasa memperhatikan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di bidang lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang yang ada.



### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 MAKSUD PENYUSUNAN RENJA DPUPR KABUPATEN NUNUKAN**

Adapun maksud penyusunan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Tahun 2027 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

#### **1.3.2 TUJUAN PENYUSUNAN RENJA DPUPR KABUPATEN NUNUKAN**

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026;
- b. Sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan pada tahun 2026; dan
- c. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan.



#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2025**

Bab ini memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PD Tahun 2025 dan perkiraan capaian Tahun 2027 dengan mengacu pada APBD Tahun 2026. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA PD tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi, dan realisasi RENSTRA PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD bersangkutan.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat telaah kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan, serta tujuan dan sasaran



rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027.

#### **BAB V PENUTUP**

Penutup berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun kemungkinan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta tindak lanjut.



## BAB II

# Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

### 2.1 **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DPUPR 2021-2026**

Evaluasi hasil pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun lalu dilakukan dengan melihat indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra periode tahun sebelumnya yakni RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026 terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penentuan IKK mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. Selain itu, dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan pada Tahun 2024 melakukan evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian pada indikator kinerja Tujuan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA PD)**  
**Sampai Dengan Tahun Berjalan Tahun Lalu**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
<b>1</b>	<b>URUSAN PELAYANAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
1.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan unit pelayanan publik yang bernilai baik (%)			100 Persen	100 Persen	100 Persen			
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8 Dokumen	8 Dokumen	100 Persen			
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen			
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen			



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen			
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>49 Orang/ Bulan</b>	<b>49 Orang/ Bulan</b>	<b>100 Persen</b>			
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			49 Orang/ Bulan	49 Orang/ Bulan	100 Persen			
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>4 Paket</b>	<b>4 Paket</b>	<b>100 Persen</b>			
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100 Persen			
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100 Persen			



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100 Persen			
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Paket	1 Paket	100 Persen			
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</b>			<b>2 Paket</b>	<b>2 Paket</b>	<b>100 Persen</b>			
'1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100 Persen			
'1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100 Persen			
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>24 Laporan</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>100 Persen</b>			



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100 Persen			
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100 Persen			
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>28 Unit</b>	<b>28 Unit</b>	<b>100 Persen</b>			
1.03.01.2.09.0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			25 Unit	25 Unit	100 Persen			
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	2 Unit	100 Persen			
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	100 Persen			



# PEMERINTAH KAB NUNUKAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pesertase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten			55,59 Persen	46,52 Persen	83,68 Persen			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi			53,33 Persen	88,44 Persen	165,84 Persen			
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			55,59 Persen	46,52 Persen	83,68 Persen			
1.03.02.2.01.0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara			6 Unit	4 Unit	75,00 Persen			
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara			1,006 KM	1,006 KM	100,00 Persen			



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
1.03.02.2.01.0046	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi			3,192 KM	3,192 KM	100,00 Persen			
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan			0,262 KM	0,262 KM	100,00 Persen			
1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun			0,375 KM	0,375 KM	100,00 Persen			
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun			0,576 KM	0,576 KM	100,00 Persen			
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun			0,412 KM	0,412 KM	100,00 Persen			
1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi			0,499 KM	0,499 KM	100,00 Persen			



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun			11 Dokumen	9 Dokumen	81,81 Persen			
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>53,33 Persen</b>	<b>88,44 Persen</b>	<b>165,84 Persen</b>			
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun			0,093 KM	0,093 KM	100,00 Persen			
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			0,792 KM	0,792 KM	100,00 Persen			
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			0,096 KM	0,096 KM	100,00 Persen			



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase penduduk berakses air minum</b>			<b>69,35 Persen</b>	<b>62,65 Persen</b>	<b>90,34 Persen</b>			
1.03.03.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>69,35 Persen</b>	<b>62,65 Persen</b>	<b>90,34 Persen</b>			
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			20 Liter per detik	20 Liter per detik	100 Persen			
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			30 Liter per detik	30 Liter per detik	100 Persen			
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi			4 Unit	4 Unit	100 Persen			
1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura)</b>			<b>27,58 Persen</b>	<b>0,00 Persen</b>	<b>0,00 Persen</b>			



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
1.03.04.2.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Sistem dan jaringan Pengelolaan Persampahan</b>			27,58 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen			
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun			1 Ton Per Hari	0 Ton Per Hari	0,00 Persen			
1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase rumah tangga bersanitasi</b>			73,25 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen			
1.03.05.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik</b>			73,25 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen			
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun			10 M <sup>3</sup> /Hari	0 M <sup>3</sup> /Hari	0,00 Persen			



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat			100,00 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen			
1.03.06.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			100,00 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen			
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan			40 Sistem Drainase Lingkungan	40 Sistem Drainase Lingkungan	100,00 Persen			
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi			5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	100,00 Persen			
1.03.07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	Persentase penduduk berakses air minum			69,35 Persen	62,65 Persen	90,34 Persen			



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
<b>1.03.07.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya jaringan air bersih dengan kondisi baik dan berfungsi</b>			<b>69,35 Persen</b>	<b>62,65 Persen</b>	<b>90,34 Persen</b>			
1.03.07.2.01.0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun			50 Liter per detik	50 Liter per detik	100,00 Persen			
1.03.07.2.01.0036	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun			9 Unit	2 Unit	22,22 Persen			
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase bangunan publik yang terbangun</b>			<b>20 Persen</b>	<b>20 Persen</b>	<b>100,00 Persen</b>			
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			20 Persen	20 Persen	100,00 Persen			



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			45 Dokumen	59 Dokumen	131,11 Persen			
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBC), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBC), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			30 Dokumen	30 Dokumen	100,00 Persen			
1.03.09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Utilitas (PSU)</b>			100,00 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen			
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			100,00 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen			



## PEMERINTAH KAB NUNUKAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6	10	11	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata			19 Kawasan	22 Kawasan	115,78 Persen			
1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Tingkat kemantapan jalan kabupaten			58,23 Persen	58,98 Persen	101,29 Persen			
		Indeks aksesibilitas			1,59 Indeks	1,25 Indeks	78,62 Persen			
1.03.10.2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			56,10 Persen	56,65 Persen	100,98 Persen			
1.03.10.2.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			28 Dokumen	28 Dokumen	100,00 Persen			



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
1.03.10.2.01.0005	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun			10,229 KM	10,229 KM	100,00 Persen			
1.03.10.2.01.0008	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			38,049 KM	38,049 KM	100,00 Persen			
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	100,00 Persen			
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun			66,50 Meter	66,50 Meter	100,00 Persen			
1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala			100 Meter	0 Unit	0,00 Persen			
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 Persen			



# PEMERINTAH KAB NUNUKAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi			22,422 KM	22,422 KM	100,00 Persen			
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			3,017 KM	3,017 KM	100,00 Persen			
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen RTRW</b>			<b>70,00 Persen</b>	<b>100,00 Persen</b>	<b>142,86 Persen</b>			
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi RTRW dan RRTR			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 Persen			
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 Persen			
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 Persen			



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3			4	5	6		10	11
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 Persen			
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 Persen			
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 Persen			

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NUNUKAN

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2021-2026, hasil analisis pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan pada Tahun 2024 sampai dengan saat ini masih sesuai



rencana. Secara lengkap rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/ kegiatan sampai dengan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi capaian Tahun 2027 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan disajikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan

No	SASARAN	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	<b>Meningkatnya Kualitas Jalan Kabupaten</b>	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	-	-	Persen	55,22	56,10	57,13	58,23	58,23	58,26	<b>58,98</b>	-	58,26	-	
		Indeks aksesibilitas	-	-	Indeks	1,11	1,27	1,43	1,59	1,75	1,91	<b>1,25</b>	-	1,91	-	
2	<b>Meningkatkan kualitas infrastruktur SDA mendukung pertumbuhan ekonomi</b>	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	-	Persen	20,00	26,67	40,00	53,33	66,67	86,67	<b>88,44</b>	-	86,67	-	
3		Pesertase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	-	-	Persen	54,63	54,95	55,27	55,59	55,91	56,23	<b>46,52</b>	-	56,23	-	



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

No	SASARAN	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	<b>Meningkatnya pemenuhan infrastruktur Keciptakarya yang mendukung pertumbuhan ekonomi</b>	Persentase penduduk yang berakses air minum	-	-	Persen	54,83	<b>59,67</b>	64,51	69,35	74,19	79,03	<b>62,65</b>	-	79,03	--	
5		Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura)	-	-	Persen	16,06	<b>0,00</b>	23,74	27,58	31,42	35,26	<b>0,00</b>	-	35,26	-	
6		Persentase Rumah bersanitasi	-	-	Persen	72,47	<b>72,73</b>	73,00	73,26	73,52	73,77	<b>0,00</b>	-	73,77	-	
7		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	-	-	Persen	25,50	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00	25,50	<b>100,0</b>	-	25,50	-	
8		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Utilitas (PSU)	-	-	Persen	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	<b>100,0</b>	-	100,00	-	
9		Persentase bangunan publik yang terbangun	-	-	Persen	20,00	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00	100,00	<b>20,00</b>	-	100,00	-	
10	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah</b>	Persentase fasilitasi pembinaan SDM jasa konstruksi	-	-	Persen	35,00	<b>35,00</b>	35,00	70,00	70,00	100,00	<b>100,0</b>	-	100,00	-	
11		Persentase penyelesaian dokumen RTRW	-	-	Persen	20,00	<b>40,00</b>	60,00	70,00	80,00	100,00	<b>100,0</b>	-	100,00	-	
12	<b>Optimalnya pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel</b>	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	-	-	Persen	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	<b>100,0</b>	-	100,00	-	



### **2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NUNUKAN**

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Dinas Pekerjaan Umu dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan menetapkan 10 (Sepuluh) indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja organisasinya yakni

- (1) Tingkat kemantapan jalan kabupaten.**
- (2) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.**
- (3) Persentase penduduk berakses air minum.
- (4) Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura).
- (5) Persentase rumah tangga bersanitasi.
- (6) Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat.**
- (7) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Utilitas (PSU).**
- (8) **Persentase bangunan publik yang terbangun.**
- (9) Persentase fasilitasi pembinaan SDM jasa konstruksi.
- (10) Persentase penyelesaian dokumen RTRW.**

Sampai dengan akhir Tahun 2024, sejumlah 6 dari 10 indikator kinerja tersebut sudah tercapai sesuai target. Sementara 4 indikator lainnya belum memenuhi target indikator kinerja yang ditapkan dengan berbagai masalah yang dihadapi untuk setiap program yang dilaksanakan.



Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan, antara lain :

**(1) Bidang Sumber Daya Air**

Tiga kegiatan Pengelolaan SDA sesuai Undang-Undang no 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu Konservasi, Pendayagunaan dan Pengendalian Daya Rusak dengan didukung oleh Sistem Informasi SDA serta Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dituangkan dalam tiga Kegiatan Prioritas yaitu Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan, Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur serta Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi. Ketiga Program prioritas tersebut mempunyai isu strategis dan tantangan berbeda yang memerlukan pendekatan khusus.

**(2) Bidang Jalan**

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total Panjang jaringan jalan mencapai, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,98% untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air.



Pada sisi lain, ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km.

Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T termasuk pada pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, juga masih belum memadai untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.

**(3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.**

Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman;
- b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;



- e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

**(4) Pembiayaan Infrastruktur**

Isu strategis dan tantangan pembiayaan infrastruktur meliputi isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bidang pekerjaan umum dan perumahan.

**(5) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan**

Beberapa hal yang menjadi catatan berdasarkan pengalaman periode lalu dalam hal efektivitas tugas dan fungsi BPIW, antara lain terdapat overlapping pekerjaan antar pusat-pusat yang ada di BPIW (Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan), dimana instrumen perencanaan terlalu banyak (nasional, pulau, WPS, kawasan strategis, metropolitan, perkotaan, perdesaan) Implikasinya antara lain:

- a. Keterkaitan perencanaan makro-meso-mikro seringkali tidak kuat karena dijalankan secara paralel dan oleh unit kerja yang berbeda.
- b. Keterkaitan program dan justifikasi pemrograman belum kuat dan sering terjadi duplikasi program.

**(6) Pembinaan Jasa Konstruksi**

***Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja Kontruksi (TKK)***



Dilihat dari persebarannya, tenaga kerja konstruksi, baik ahli maupun terampil, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan belum tersebar merata di seluruh Indonesia sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa.

***Kurangnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi***

Kurangnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain: transparansi penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa belum maksimal, kurang maksimalnya pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi, belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan penerapan SMM dan SMK3 dan peningkatan kasus kecelakaan kerja konstruksi.

Berdasarkan hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (K2), kecelakaan tersebut disebabkan utamanya oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM dan permasalahan peralatan. Permasalahan SDM khususnya disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Sedangkan permasalahan peralatan utamanya disebabkan karena masih rendahnya pelaksanaan safety faktor.

***Ketidakmapanan Kelembagaan Jasa Konstruksi***

Ketidakmapanan kelembagaan jasa konstruksi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu masih lemahnya sumber daya manusia aparatur lembaga masyarakat konstruksi, rendahnya jumlah asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang tersertifikasi, serta pengembangan kerja sama antar lembaga yang belum optimal.

**Kapasitas Rantai Pasok, Material Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang Belum Optimal**

Terkait dengan kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi yang belum optimal, masih memiliki kelemahan



antara lain ketidakseimbangan antara supply-demand beberapa material seperti

- semen, baja, aspal, dan alat berat; persebaran material dan peralatan belum merata;
- kurang optimalnya pelaksanaan dan penerapan teknologi green construction; dan
- lemahnya penguasaan teknologi konstruksi.

Terkait supply dan demand material konstruksi, berdasarkan data, Ditjen Bina Konstruksi, jumlah MPK utama berupa aspal, baja, beton pracetak prategang, semen, dan alat berat cenderung mengalami penurunan sekitar 6% setiap tahunnya. Berbagai kebutuhan material tersebut akan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Dalam mengatasi isu-isu penting dan permasalahan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan telah melaksanakan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan OPD yang menangani Bidang Sumber Daya Air, Bidang Jalan, Bidang Pembangunan Infrastruktyur Bangunan Gedung, Perencanaan Pembangunan Kewilayahan, dan Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi di kabupaten/ kota serta dengan Kementerian PUPR, melalui Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026. Selain melalui kegiatan Rakor dan Forum OPD tersebut, koordinasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan Musrenbang kabupaten.

Meskipun beberapa permasalahan dan hambatan masih muncul, namun tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan terhadap capaian Program. Adapun dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan terhadap capaian Program sebagaimana dalam Tabel 2.4



#### **2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Setelah dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD, terdapat proses analisis dan penyesuaian antara rancangan awal RKPD dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian RKPD antara lain usulan dan masukan dari Bappeda, usulan Pemerintah Desa/ Kecamatan, OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, dan masyarakat melalui rangkaian proses Musrenbang tersebut. Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD 2026 dengan usulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dengan hasil analisis adalah sesuai Tabel 2.3 sebagai berikut:



**Tabel 2.3**  
**Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan**

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							359.501.627.945,00				359.501.627.945,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							359.501.627.945,00				359.501.627.945,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							359.501.627.945,00				359.501.627.945,00	
1.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							49.101.291.474,00				49.101.291.474,00	
1.03.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							334.385.000,00				334.385.000,00	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	4 Dokumen	12 Dokumen	106.050.000,00	100 Persen	4 Dokumen	12 Dokumen	106.050.000,00	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	3 Laporan	12 Laporan	84.845.000,00	100 Persen	3 Laporan	12 Laporan	84.845.000,00	



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	3 Laporan	12 Laporan	143.490.000,00	100 Persen	3 Laporan	12 dokumen	144.360.000,00
1.03.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							35.691.824.368,00				35.691.824.368,00
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	65 Orang/bulan	65 Orang/Bulan	35.691.824.368,00	100 Persen	65 Orang/bulan	65 Orang/Bulan	35.691.824.368,00
1.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							971.471.150,00				971.471.150,00
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	1 Paket	4 Paket	395.440.000,00	100 Persen	1 Paket	4 Paket	395.440.000,00
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	1 Paket	4 Paket	172.328.450,00	100 Persen	1 Paket	4 Paket	172.328.450,00



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	keuangan perangkat daerah											
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	1 Paket	4 Paket	51.463.700,00	100 Persen	1 Paket	4 Paket	51.463.700,00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	1 Paket	4 Paket	352.239.000,00	100 Persen	1 Paket	4 Paket	352.239.000,00
1.03.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>8.202.188.160,00</b>				<b>8.202.188.160,00</b>
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	2 Unit	5 Unit	154.438.160,00	100 Persen	2 Unit	5 Unit	154.438.160,00
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	3 Unit	5 Unit	8.047.750.000,00	100 Persen	3 Unit	5 Unit	8.047.750.000,00



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
	keuangan perangkat daerah												
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.587.680.336,00				3.587.680.336,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	12 Laporan	24 Laporan	185.600.000,00	100 Persen	12 Laporan	24 Laporan	185.600.000,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	12 Laporan	24 Laporan	3.402.080.336,00	100 Persen	12 Laporan	24 Laporan	3.402.080.336,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							313.742.460,00				313.742.460,00	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	25 Unit	28 Unit	115.052.460,00	100 Persen	25 Unit	28 Unit	115.052.460,00	



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
1.03.01. 2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	2 Unit	28 Unit	43.690.000,00	100 Persen	2 Unit	28 Unit	43.690.000,00	
1.03.01. 2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Unit	28 Unit	155.000.000,00	100 Persen	1 Unit	28 Unit	155.000.000,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
1.03.02.2. 01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
1.03.02.2. 01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai												
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0.5 KM	56.23 Persen	0,00	56.23 Persen 86.67 %	0.5 KM	56.23 Persen	0,00	
1.03.02.2.	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING	
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA				
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
01.0089													
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	5 Unit	56.23 Persen	0,00	56.23 Persen 86.67 %	5 Unit	56.23 Persen	0,00	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai												
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	1,0 KM	56.23 Persen	0,00	56.23 Persen 86.67 %	1,0 KM	56.23 Persen	0,00	
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00	
1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai												
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00	
1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya												
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00	



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		kabupaten									
1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir											
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	1,0 KM	56.23 Persen	0,00	56.23 Persen 86.67 %	1,0 KM	56.23 Persen	0,00
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai											
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00
1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai											



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING		
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA					
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00		
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya													
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	2 Dokumen	56.23 Persen	0,00	56.23 Persen 86.67 %	2 Dokumen	56.23 Persen	0,00		
1.03.02.2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>													
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan													



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	86.67 %	0,00	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	86.67 %	0,00	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan												
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	86.67 %	0,00	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	86.67 %	0,00	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan												
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,25 KM	86.67 %	0,00	56.23 Persen 86.67 %	0,25 KM	86.67 %	0,00	



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
	pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan												
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,25 KM	86.67 %	0,00	56.23 Persen 86.67 %	0,25 KM	86.67 %	0,00	
1.03.02.2.02.0047	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	1 Rekomendasi	86.67 %	0,00	56.23 Persen 86.67 %	1 Rekomendasi	86.67 %	0,00	
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING	
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA				
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	2 Dokumen	86.67 %	0,00	56.23 Persen 86.67 %	2 Dokumen	86.67 %	0,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							9.790.240.000,00				9.790.240.000,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							9.790.240.000,00				9.790.240.000,00	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)												
	Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Persentase penduduk berakses air minum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.03 Persen	3 Dokumen	79,03 %	0,00	79.03 Persen	3 Dokumen	79,03 %	0,00	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
	Persentase penduduk berakses air minum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Persentase penduduk berakses air minum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.03 Persen	20 Liter/ Detik	79,03 %	0,00	79.03 Persen	20 Liter/ Detik	79,03 %	0,00	
1.03.03.2.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
01.0028													
	Persentase penduduk berakses air minum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Persentase penduduk berakses air minum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.03 Persen	20 Liter/ Detik	79,03 %	2.010.240.000,00	79.03 Persen	20 Liter/ Detik	79,03 %	2.010.240.000,00	
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
	Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Persentase penduduk berakses air minum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.03 Persen	20 Unit	79,03 %	6.380.000.000,00	79.03 Persen	20 Unit	79,03 %	6.380.000.000,00	
1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan												
	Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Persentase penduduk berakses air minum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.03 Persen	2 Unit	79,03 %	1.400.000.000,00	79.03 Persen	2 Unit	79,03 %	1.400.000.000,00	
<b>1.03.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>							<b>2.350.000.000,00</b>				<b>2.350.000.000,00</b>	
<b>1.03.04.2.01</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>2.350.000.000,00</b>				<b>2.350.000.000,00</b>	
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS												
	Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura)	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.26 %	1 Unit	35.26 %	50.000.000,00	35.26 %	1 Unit	35.26 %	50.000.000,00	



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R												
	Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura)	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.26 %	3 Ton/hari	35.26 %	2.300.000.000,00	35.26 %	3 Ton/hari	35.26 %	2.300.000.000,00	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>							<b>1.090.000.000,00</b>				<b>1.090.000.000,00</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>1.090.000.000,00</b>				<b>1.090.000.000,00</b>	
1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat												
	Persentase rumah tangga bersanitasi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Persentase rumah tangga bersanitasi	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.77 Persen	3 M <sup>3</sup> /Hari	73.77 %	2.300.000.000,00	73.77 Persen	3 M <sup>3</sup> /Hari	73.77 %	2.300.000.000,00	
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)												
	Persentase rumah tangga bersanitasi	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun yang dibangun	Persentase rumah tangga bersanitasi	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.77 Persen	3 M <sup>3</sup> /Hari	73.77 %	0,00	73.77 Persen	3 M <sup>3</sup> /Hari	73.77 %	0,00	
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
	Persentase rumah tangga bersanitasi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Persentase rumah tangga bersanitasi	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.77 Persen	2 Dokumen	73.77 %	100.000.000,00	73.77 Persen	2 Dokumen	73.77 %	100.000.000,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							6.780.040.000,00				6.780.040.000,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							6.780.040.000,00				6.780.040.000,00	
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan												
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Sistem Saluran Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang berfungsi dengan baik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 Persen	1000 Meter	100,00 Persen	5.005.040.000,00	100,00 Persen	1000 Meter	100,00 Persen	5.005.040.000,00	
1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan												
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Sistem Saluran Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 Persen	1000 Meter	100,00 Persen	760.000.000,00	100,00 Persen	1000 Meter	100,00 Persen	760.000.000,00	



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
			berfungsi dengan baik										
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan												
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Sistem Saluran Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang berfungsi dengan baik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 Persen	5 Sistem Drainase Perkotaan	100,00 Persen	275.000.000,00	100,00 Persen	5 Sistem Drainase Perkotaan	100,00 Persen	275.000.000,00	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan												
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Sistem Saluran Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang berfungsi dengan baik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 Persen	5 Sistem Drainase Perkotaan	100,00 Persen	490.000.000,00	100,00 Persen	5 Sistem Drainase Perkotaan	100,00 Persen	490.000.000,00	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Sistem Saluran Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang berfungsi dengan baik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 Persen	5 Sistem Drainase Perkotaan	100,00 Persen	250.000.000,00	100,00 Persen	5 Sistem Drainase Perkotaan	100,00 Persen	250.000.000,00	
<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>							0,00				0,00	
<b>1.03.07.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>							0,00				0,00	
1.03.07.2.01.0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota												
	Persentase penduduk berakses air minum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Tersedianya jaringan air bersih dengan kondisi baik dan berfungsi	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79,03 Persen	20 Liter/ Detik	79,03 %	0,00	79,03 Persen	20 Liter/ Detik	79,03 %	0,00	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>							<b>35.668.840.000</b>				<b>35.668.840.000</b>	
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>							<b>35.668.840.000</b>				<b>35.668.840.000</b>	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
	Persentase bangunan publik yang terbangun	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten dengan kondisi baik Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	20 Dokumen	20 persen	35.668.840.000	20 %	20 Dokumen	20 persen	35.668.840.000	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG												
	Persentase bangunan publik yang terbangun	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten dengan kondisi baik Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	20 Dokumen	20 persen	0,00	20 %	20 Dokumen	20 persen	0,00	



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>							<b>2.520.240.000,00</b>				<b>2.520.240.000,00</b>	
<b>1.03.09.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>2.520.240.000,00</b>				<b>2.520.240.000,00</b>	
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota												
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Utilitas (PSU)	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategi	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Kawasan	1 Sistem Jaringan 100 persen	2.520.240.000,00	100 %	5 Kawasan	1 Sistem Jaringan 100 persen	2.520.240.000,00	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>							<b>247.259.610.901</b>				<b>247.259.610.901</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>							<b>247.259.610.901</b>				<b>247.259.610.901</b>	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan												
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan jalan dan Jembatan yang Disusun	Jalan yang di bangun dalam kondisi baikTingkat kemantapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	5 Dokumen	1.91 Indeks 58.26 Persen	300.000.000,00	1.91 Indeks 58.26 Persen	5 Dokumen	1.91 Indeks 58.26 Persen	300.000.000,00	



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan												
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	30 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	500.000.000,00	1.91 Indeks 58.26 Persen	30 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	500.000.000,00	
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan												
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	6.5 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	1.740.000.000,00	1.91 Indeks 58.26 Persen	6.5 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	1.740.000.000,00	
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan												
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Panjang Jalan yang Dibangun	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	4 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	29.653.000.000,00	1.91 Indeks 58.26 Persen	4 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	29.653.000.000,00	
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan												
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	19 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	60.799.400.000,00	1.91 Indeks 58.26 Persen	19 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	60.799.400.000,00	
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING	
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)		
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN			
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	29.8 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	135.757.210.901	1.91 Indeks 58.26 Persen	29.8 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	135.757.210.901		
1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan													
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	25 Meter	1.91 Indeks 58.26 Persen	245.000.000,00	1.91 Indeks 58.26 Persen	25 Meter	1.91 Indeks 58.26 Persen	245.000.000,00		
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan													
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	60.5 Meter	1.91 Indeks 58.26 Persen	18.265.000.000,00	1.91 Indeks 58.26 Persen	60.5 Meter	1.91 Indeks 58.26 Persen	18.265.000.000,00		
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>							<b>250.000.000,00</b>				<b>250.000.000,00</b>		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							<b>250.000.000,00</b>				<b>250.000.000,00</b>		
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi													
	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	10 Lembaga	1 Kegiatan	250.000.000,00	100 Persen	10 Lembaga	1 Kegiatan	250.000.000,00		



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>							<b>4.331.465.570,00</b>				<b>4.331.465.570,00</b>	
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>							<b>612.477.330,00</b>				<b>612.477.330,00</b>	
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota												
	Persentase penyelesaian dokumen RTRW	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi RTRW dan RRTR	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	612.477.330,00	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	612.477.330,00	
<b>1.03.12.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>2.700.002.750,00</b>				<b>2.700.002.750,00</b>	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota												
	Persentase penyelesaian dokumen RTRW	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>2.700.002.750,00</b>	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>2.700.002.750,00</b>	
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>501.570.790,00</b>				<b>501.570.790,00</b>	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang												
	Persentase penyelesaian dokumen RTRW	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>501.570.790,00</b>	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>501.570.790,00</b>	
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>517.414.700,00</b>				<b>517.414.700,00</b>	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			Pagu Indikatif (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
	Persentase penyelesaian dokumen RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>517.414.700,00</b>	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>517.414.700,00</b>	



## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Rancangan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di tingkat kecamatan. Pada forum OPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan selaku OPD Teknis dari kelompok masyarakat melalui Camat masing-masing wilayah. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat adalah inisiatif yang diajukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk pembangunan dan perbaikan di berbagai bidang. Usulan ini biasanya ditampung melalui forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota, dan selanjutnya akan dipertimbangkan untuk diakomodir dalam rencana pembangunan daerah.

Usulan program dan kegiatan masyarakat disusun melalui berbagai tahapan, dimulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan usulan, hingga pembahasan dalam forum Musrenbang. Masyarakat memiliki peran aktif dalam proses ini, mulai dari mengidentifikasi masalah, menyusun usulan, hingga mengawal pelaksanaan program yang telah disepakati. Usulan program dan kegiatan masyarakat harus memenuhi kriteria tertentu, seperti relevansi dengan kebutuhan masyarakat, skala prioritas, dan keselarasan dengan kepentingan yang lebih luas.



Gambar 2.1  
**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Nunukan Tahun 2026**



Terhadap beberapa usulan program kegiatan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan anggaran PD yang masih terbatas, sehingga tidak semua usulan dapat terakomodir namun dipertimbangkan untuk diusulkan melalui dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pembiayaan belanja program dan kegiatan yang diusulkan menggunakan anggaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dengan penggunaan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Bantuang Keuangan Propinsi.

Usulan program dan kegiatan masyarakat perlu ditelaah untuk menjadi program kegiatan yang terencana dan terstruktur. Tahapan yang lakukan adalah dengan merumuskan rencana program dan kegiatan yang



jelas, terukur, dan realistis, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia (anggaran, tenaga ahli, sarana prasarana). Merumuskan tujuan yang ingin dicapai melalui program dan menetapkan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART). Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, termasuk anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut, usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diwujudkan menjadi program kegiatan yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Usulan program kegiatan masyarakat melalui hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di tingkat kecamatan dapat diakses melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan alamat <https://nunukankab.sipd.kemendagri.go.id>.

=



# BAB III

## Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

### 3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan delapan misi utama, dikenal sebagai Asta Cita, sebagai landasan untuk mencapai visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045".

#### 1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Misi pertama menekankan pentingnya memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, memperkuat sistem demokrasi, serta menjunjung tinggi HAM. Langkah ini bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.

#### 2. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Misi kedua fokus pada peningkatan pertahanan dan keamanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selain itu, pemerintah berupaya mencapai kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan air untuk memastikan ketahanan nasional yang komprehensif.



### **3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan**

Pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

### **4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender**

Misi keempat menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Pemerintah juga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan.

### **5. Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi**

Pemerintah berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

### **6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi**

Misi keenam menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini melibatkan peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah pedesaan.

### **7. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba**

Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi dan narkoba akan diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif.



## **8. Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama**

Misi terakhir menekankan pentingnya menjaga harmoni antara lingkungan dan budaya, serta mendorong toleransi antarumat beragama. Hal ini bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

Berbagai kementerian dan lembaga telah menyusun program strategis untuk mendukung pencapaian Asta Cita. Asta Cita merupakan cetak biru bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Asta Cita mencerminkan prinsip-prinsip dasar dan komitmen yang harus dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam memimpin Indonesia, dengan tujuan mencapai Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dengan fokus pada delapan misi strategis, pemerintah berupaya menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintahan daerah, dalam menjalankan tugasnya, perlu selaras dengan Asta Cita Presiden. Asta Cita, yang merupakan delapan cita-cita utama presiden, menjadi dasar dalam penyusunan visi dan misi pemerintah daerah. Dengan menyelaraskan program-program daerah dengan Asta Cita, diharapkan pembangunan di daerah dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah, dalam menjalankan tugasnya, perlu selaras dengan Asta Cita Presiden. Asta Cita, yang merupakan delapan cita-cita utama presiden, menjadi dasar dalam penyusunan visi dan misi pemerintah daerah. Dengan menyelaraskan program-program daerah dengan Asta Cita, diharapkan pembangunan di daerah dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Program-program pembangunan di daerah harus mempertimbangkan Asta Cita. Dalam pelaksanaan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kegiatan



yang dilakukan selaras dengan Asta Cita. Hal ini mencakup aspek efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dengan demikian, pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan Asta Cita melalui sinergi program dan kegiatan pembangunan di daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.

### **3.1.1. RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024**

Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang oleh Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian pembangunan infrastruktur nasional adalah:

#### ***Sasaran Pembangunan PN 1 & PN 5 (Kementerian PUPR) dalam RPJMN 2020-2024***

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.



**Keterkaitan Visi, Misi, Arah Presiden dan 7 Agenda Pembangunan**



Sumber Data: Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR 2020 – 2024 yang terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor antara lain adalah:

- a) **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LINTAS SEKTORAL** terdiri dari 3 (tiga) arah kebijakan yaitu:
  - a. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Wilayah
  - b. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengarusutamaan Gender



c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur PUPR Tangguh Bencana.

b) **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UTAMA**

terdiri dari 5 (lima) arah kebijakan yaitu:

a. **Arah Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;**

- 1) Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan.
- 2) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
- 3) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

b. **Arah Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan;**

- 1) Preservasi Jalan

Peningkatan kualitas kemantapan jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan

- 2) Pembangunan Jalan dan Jembatan

Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah

- 3) Penataan Jalan Nasional di Kawasan Perkotaan

c. **Arah Kebijakan Dan Strategi Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;**

- 1) Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman;
- 2) Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman;
- 3) Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman.

d. Arah Kebijakan Dan Strategi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan.

e. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan. Telaah terhadap kebijakan nasional yang merupakan hasil identifikasi kebijakan Nasional antara lain :



- 1) Tingkat kemantapan jalan kabupaten;
- 2) Indeks aksesibilitas;
- 3) Pesertase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten
- 4) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi;
- 5) Persentase penduduk yang berakses air minum;
- 6) Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura);
- 7) Persentase Rumah Tangga bersanitasi;
- 8) Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat;
- 9) Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Utilitas (PSU);
- 10) Pesentase bangunan gedung yang terbangun;
- 11) Persentase pembinaan SDM jasa konstruksi;
- 12) Persentase penyelesaian dokumen RTRW;
- 13) Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sementara itu Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah rumusan yang menjelaskan arah dan target yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis



(Renstra) perangkat daerah. Tujuan Renja adalah untuk mengoperasionalkan RKPD dan Renstra, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Renja berfungsi sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana. Renja menjadi instrumen untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah, termasuk efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Renja menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran yang jelas dalam Renja sangat penting agar perangkat daerah memiliki arah yang jelas dalam menjalankan tugasnya, dan agar hasil yang dicapai dapat diukur secara terukur dan terarah. Dengan demikian, Renja yang baik akan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **3.2.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPUPR KABUPATEN NUNUKAN**

Dalam rangka menjabarkan misi dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan maka ditetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk Tahun 2026. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Tahun 2026 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 berikut ini:



Tabel 3.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  
DPUPR Kab Nunukan Tahun 2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatnya Kualitas Jalan Kabupaten	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	<b>Persen</b>	<b>58,26</b>
			Indeks aksesibilitas	<b>Indeks</b>	<b>1,91</b>
		Meningkatkan kualitas infrastruktur SDA mendukung pertumbuhan ekonomi	Pesertase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	<b>Persen</b>	<b>56,23</b>
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	<b>Persen</b>	<b>86,67</b>
2	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur Keciptakarya yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase penduduk yang berakses air minum	<b>Persen</b>	<b>79,03</b>
			Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura)	<b>Persen</b>	<b>35,26</b>
			Persentase Rumah Tangga	<b>Persen</b>	<b>73,77</b>



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

No	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			bersanitasi		
			Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>
			Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Utilitas (PSU)	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>
			Persentase bangunan gedung yang terbangun	<b>Persen</b>	<b>20,00</b>
			Persentase pembinaan SDM jasa konstruksi	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>
			Meningkatnya Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah		Persentase penyelesaian dokumen RTRW
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Optimalnya pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>



### **3.2.2 STRATEGI KEBIJAKAN DPUPR KABUPATEN NUNUKAN**

Strategi dan arah kebijakan dalam Renja merupakan strategi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana dinas mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya sasaran yang menjadi fokus intervensi dalam pelayanan perangkat daerah. Selanjutnya sasaran perlu ditunjang oleh strategi yang tepat sehingga bisa didapatkan indikator yang tepat untuk mengakselerasi pencapaiannya. Strategi yang dirumuskan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan yang tepat dan prioritas dalam pengarusutamaan visi misi. Strategi yang telah dirumuskan selanjutnya lebih dijabarkan pada arah kebijakan. Rumusan ini akan melandasi pada perencanaan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan.



**Tabel 3.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPUPR Kab Nunukan**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kemudahan Konektivitas antar wilayah dalam Kabupaten.	Meningkatkan konektivitas antara sentra produksi dengan akses pasar maupun lintas wilayah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengharmoniskan sistem jaringan jalan dan jembatan dengan kebijakan tata ruang wilayah.</li><li>2. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang telah terbangun.</li></ol>
		Meningkatkan kualitas infrastruktur SDA mendukung pertumbuhan ekonomi.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi pada kawasan dengan potensi produktivitas yang tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan debit air irigasi dengan dukungan kualitas bangunan air yang optimal pada daerah irigasi potensial surplus komoditas pertanian.</li><li>2. Pendayagunaan sumber daya air untuk pertanian difokuskan pada upaya peningkatan cakupan jaringan irigasi dan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun.</li></ol>



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur Keciaptakarya yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan menyelaraskan pembangunan dengan aspek- aspek iklim, sumber daya alam, ekonomi serta sosial dan budaya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan perencanaan dan pengembangan pembangunan gedung dan fasilitas publik yang berwawasan lingkungan.</li> <li>2. Meningkatkan pemanfaatan gedung dan fasilitas publik yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Pendayaagunaan sumber air diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis.</li> </ol>
			1. Pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sanitasi dan drainase.</li> <li>2. Menurunkan tingkat pemukiman kumuh dengan meningkatkan pemanfaatan sanitasi lingkungan</li> </ol>
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Tata	Pengembangan kawasan-kawasan prioritas dalam rangka percepatan	1. Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan penataan ruang.



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Ruang Daerah	pertumbuhan wilayah strategis sesuai RTRW Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Meningkatkan keselarasan kesesuaian RTRW dengan pembangunan di lapangan.</li><li>3. Meningkatkan efektifitas pelayanan penataan ruang, penyusunan standar, manual dan pedoman penataan ruang</li></ol>
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Optimalnya Pelayanan Administrasi dan Jasa Umum Perkantoran yang tertib dan akuntabel.	Meningkatkan efektifitas kinerja pelayanan serta administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"><li>o Mendorong ketersediaan kebutuhan administrasi pada setiap satuan unit kerja.</li></ul>



### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026, Program dan Kegiatan tahun 2026 disusun berdasarkan :

- (1) Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nunukan;
- (2) Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
- (3) Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan 2021-2026 direncanakan berjumlah 12 (*Dua Belas*) Program, 21 (*Dua Puluh Satu*) Kegiatan dan 62 (*Enam Puluh Dua*) Sub Kegiatan. Pada Tahun 2026, Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan bersifat pembangunann infrastruktur fisik dan berkenaan dengan belanja modal diakomodir pada anggaran APBD, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan peruntukannya.

Berikut ini disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan yang diusulkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai berikut:

#### **1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1 ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
  - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan



Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  - 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3 **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4 **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - 9 Pengadaan Mebel
  - 10 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 14 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 15 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2 **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**
  - 7 **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**



- 16 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- 17 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
- 18 Normalisasi/Restorasi Sungai
- 19 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
- 20 Peningkatan Tanggul Sungai
- 21 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
- 22 Pembangunan Kanal Banjir
- 23 Pembangunan Tanggul Sungai
- 24 Rehabilitasi Tanggul Sungai
- 25 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- 8 *Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***
  - 26 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
  - 27 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
  - 28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
  - 29 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
  - 30 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
  - 31 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa
- 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**
  - 9 *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota***



- 32 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- 33 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- 34 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- 35 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- 36 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan

**4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**

**10 *Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota***

- 37 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- 38 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R

**5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

**11 *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***

- 39 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
- 40 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- 41 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)



**6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**

**12 *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota***

- 42 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
- 43 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
- 44 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
- 45 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
- 46 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

**7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**

**13 *Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota***

- 47 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

**8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

**14 *Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung***

- 48 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 49 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai



Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung  
melalui SIMBG

- 9 **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
  - 15 ***Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota***
    - 50 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
  
- 10 **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
  - 16 ***Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota***
    - 51 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
    - 52 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
    - 53 Pemeliharaan Rutin Jalan
    - 54 Pembangunan Jalan
    - 55 Rehabilitasi Jalan
    - 56 Rekonstruksi Jalan
    - 57 Pemeliharaan Berkala Jembatan
    - 58 Pembangunan Jembatan
  
- 11 **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
  - 17 ***Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi***
    - 58 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
  
- 12 **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
  - 18 ***Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana***



***Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota***

59 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota

19 ***Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah  
Kabupaten/Kota***

60 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota

20 ***Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah  
Kabupaten/Kota***

61 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

21 ***Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
Daerah Kabupaten/Kota***

62 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang



## BAB IV

# Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja adalah dokumen yang berisi langkah-langkah terperinci untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah peta jalan yang menguraikan tugas, jadwal, sumber daya, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk melaksanakan suatu proyek atau mencapai target yang ditetapkan. Rencana kerja yang baik akan membantu memastikan keselarasan tim, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan pencapaian tujuan yang efektif. Rencana Kerja membutuhkan kerangka pendanaan yaitu bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja perangkat daerah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target perangkat daerah yang ingin dicapai dan kemampuan perangkat daerah untuk membiayai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan pada Tahun 2026 mengajukan usulan sebanyak 12 (*Dua Belas*) Program, 21 (*Dua Puluh Satu*) Kegiatan dan 62 (*Enam Puluh Dua*) Sub Kegiatan. Usulan Pagu



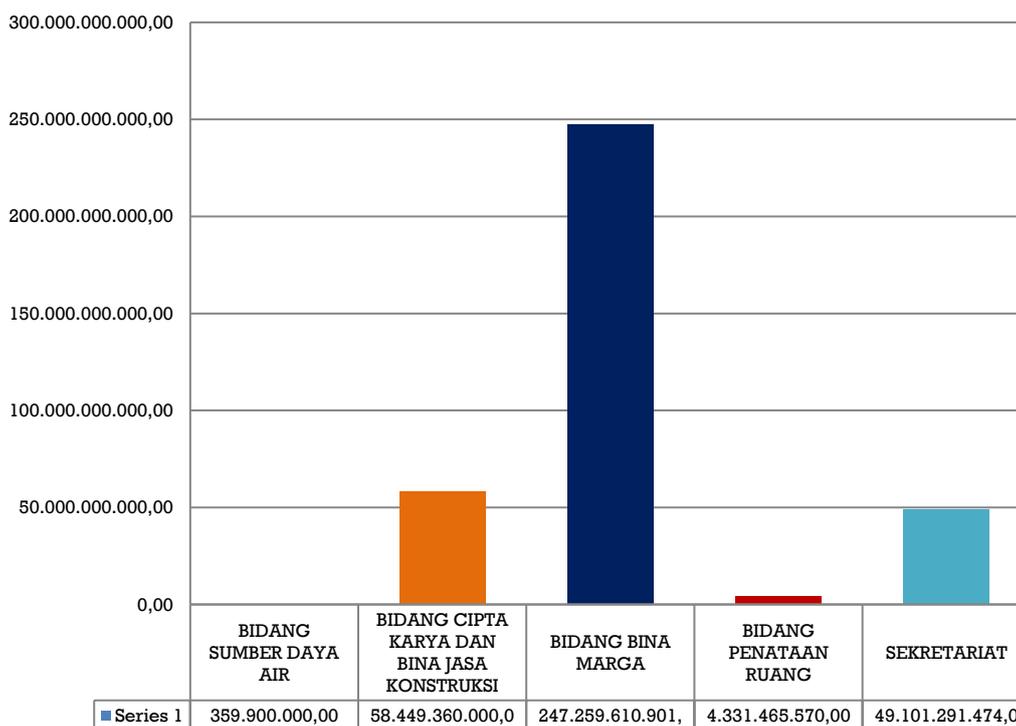
anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 359.501.627.945,00. Usulan pagu anggaran terbagi ke dalam 4 (*empat*) bidang pelaksana program dan sekretariat DPUPR Kabupaten Nunukan dengan rincian sebagai berikut :

1. **Bidang Sumber Daya Air (SDA)** memiliki usulan pagu anggaran sebesar Rp 359.900.000,00 atau sebesar 0,10%.
2. **Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi** memiliki usulan pagu anggaran sebesar Rp 58.449.360.000,00 atau sebesar 16,26%.
3. **Bidang Bina Marga** memiliki usulan pagu anggaran sebesar Rp 247.259.610.901,00 atau sebesar 68,78%.
4. **Bidang Penataan Ruang** memiliki usulan pagu anggaran sebesar Rp 4.331.465.570,00 atau sebesar 1,20%.
5. **Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan** memiliki usulan pagu anggaran sebesar Rp 49,101,291,474,00 atau sebesar 13,66%.



### **Grafik**

#### **Usulan Pagu Anggaran DPUPR Kab Nunukan Menurut Bidang Tahun Anggaran 2026**



Adapun rincian rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027 sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut sebagai berikut :



**TABEL 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPUPR Kabupaten Nunukan**  
**Tahun Anggaran 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027**

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							359.501.627.945,00				15.995.147.957,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							359.501.627.945,00				15.995.147.957,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							359.501.627.945,00				15.995.147.957,00	
1.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							49.101.291.474,00				14.495.147.957,00	
1.03.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							334.385.000,00				310.436.000,00	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	4 Dokumen	12 Dokumen	106.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4 Dokumen	12 Dokumen	107.510.000,00
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	3 Laporan	12 Laporan	84.845.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	3 Laporan	12 Laporan	59.660.000,00



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
		Iktisar Realisasi Kinerja SKPD											
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	3 Laporan	12 Laporan	143.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	3 Laporan	12 dokumen	143.266.000,00
1.03.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							35.691.824.368,00					8.136.277.525,00
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	65 Orang/bulan	65 Orang/Bulan	35.691.824.368,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	65 Orang/bulan	65 Orang/Bulan	8.136.277.525,00
1.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							971.471.150,00					975.079.450,00
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	1 Paket	4 Paket	395.440.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1 Paket	4 Paket	396.460.000,00
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	1 Paket	4 Paket	172.328.450,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1 Paket	4 Paket	173.606.650,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	1 Paket	4 Paket	51.463.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1 Paket	4 Paket	52.728.800,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	1 Paket	4 Paket	352.239.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1 Paket	4 Paket	352.284.000,00	
1.03.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>8.202.188.160,00</b>					<b>133.630.000,00</b>	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	2 Unit	5 Unit	154.438.160,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2 Unit	5 Unit	86.000.000,00	



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
1.03.01. 2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	3 Unit	5 Unit	8.047.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	3 Unit	5 Unit	47.630.000,00
1.03.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.587.680.336,00					4.625.778.272,00
1.03.01. 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	12 Laporan	24 Laporan	185.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12 Laporan	24 Laporan	186.996.000,00
1.03.01. 2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	12 Laporan	24 Laporan	3.402.080.336,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12 Laporan	24 Laporan	4.438.782.272,00
1.03.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
								313.742.460,00					313.946.710,00
1.03.01. 2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola	Jumlah Kendaraan Perorangan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Nunukan, Nunukan	100 Persen	25 Unit	28 Unit	115.052.460,00	Dana Transfer Umum-	-	25 Unit	28 Unit	115.146.710,00



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Urusan Pemerintahan Daerah	Selatan, Selisun					Dana Alokasi Umum				
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	100 Persen	2 Unit	28 Unit	43.690.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2 Unit	28 Unit	43.800.000,00
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Unit	28 Unit	155.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1 Unit	28 Unit	155.000.000,00
1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>											<b>0,00</b>	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											<b>0,00</b>	
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai												
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Pesertase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0.5 KM	56.23 Persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		di WS kewenangan kabupaten										
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya												
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Pesertase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	5 Unit	56.23 Persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai												
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Pesertase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	1,0 KM	56.23 Persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai												
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya												
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		di WS kewenangan kabupaten										
1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir												
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	1,0 KM	56.23 Persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai												
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	56.23 Persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	0,00	-
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya												
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	2 Dokumen	56.23 Persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	0,00	-
1.03.02.2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>												
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	86.67 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan												
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,5 KM	86.67 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan												
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,25 KM	86.67 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten		1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan												
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	0,25 KM	86.67 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.02.2.02.0047	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	1 Rekomendasi	86.67 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.23 Persen 86.67 %	2 Dokumen	86.67 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>							<b>9.790.240.000,00</b>					<b>1.500.000.000,00</b>
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							<b>9.790.240.000,00</b>					<b>1.500.000.000,00</b>
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)												
	Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Persentase penduduk berakses air minum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.03 Persen	3 Dokumen	79,03 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	3 Dokumen	79,03 %	0,00
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
	Persentase penduduk berakses air minum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Persentase penduduk berakses air minum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.03 Persen	20 Liter/ Detik	79,03 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	20 Liter/ Detik	79,03 %	500.000.000,00



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
	Persentase penduduk berakses air minum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Persentase penduduk berakses air minum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.03 Persen	20 Liter/ Detik	79,03 %	2.010.240.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	20 Liter/ Detik	79,03 %	0,00
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
	Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Persentase penduduk berakses air minum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.03 Persen	20 Unit	79,03 %	6.380.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	20 Unit	79,03 %	1.000.000.000,00
1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan												
	Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Persentase penduduk berakses air minum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.03 Persen	2 Unit	79,03 %	1.400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2 Unit	79,03 %	0,00
<b>1.03.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>							<b>2.350.000.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>1.03.04.2.01</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>2.350.000.000,00</b>					<b>0,00</b>
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura)	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.26 %	1 Unit	35.26 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R												
	Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura)	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.26 %	3 Ton/hari	35.26 %	2.300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>							<b>1.090.000.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>1.090.000.000,00</b>					<b>0,00</b>
1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat												
	Persentase rumah tangga bersanitasi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Persentase rumah tangga bersanitasi	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.77 Persen	3 M <sup>3</sup> /Hari	73.77 %	2.300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027				
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		
	Persentase rumah tangga bersanitasi	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun yang dibangun	Persentase rumah tangga bersanitasi	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.77 Persen	3 M <sup>2</sup> /Hari	73.77 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00	
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
	Persentase rumah tangga bersanitasi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Persentase rumah tangga bersanitasi	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.77 Persen	2 Dokumen	73.77 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00	
1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>							<b>6.780.040.000,00</b>					<b>0,00</b>	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							<b>6.780.040.000,00</b>					<b>0,00</b>	
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan													
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Sistem Saluran Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang berfungsi dengan baik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 Persen	1000 Meter	100,00 Persen	5.005.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00	



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan												
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Sistem Saluran Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang berfungsi dengan baik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 Persen	1000 Meter	100,00 Persen	760.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan												
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Sistem Saluran Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang berfungsi dengan baik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 Persen	5 Sistem Drainase Perkotaan	100,00 Persen	275.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.06.2.01.0028													



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Sistem Saluran Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang berfungsi dengan baik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 Persen	5 Sistem Drainase Perkotaan	100,00 Persen	490.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan												
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Sistem Saluran Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang berfungsi dengan baik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 Persen	5 Sistem Drainase Perkotaan	100,00 Persen	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>							<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
1.03.07.2.01	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
1.03.07.2.01.0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	Persentase penduduk berakses air minum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Tersedianya jaringan air bersih dengan kondisi baik dan berfungsi	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79,03 Persen	20 Liter/ Detik	79,03 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>							<b>35.668.840.000</b>		-	-	-	<b>0,00</b>
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							<b>35.668.840.000</b>		-	-	-	<b>0,00</b>
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												
	Persentase bangunan publik yang terbangun	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten dengan kondisi baik Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	20 Dokumen	20 persen	35.668.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	Persentase bangunan publik yang terbangun	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten dengan kondisi baik Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	20 Dokumen	20 persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>							<b>2.520.240.000,00</b>		-	-	-	0,00
<b>1.03.09.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>2.520.240.000,00</b>		-	-	-	0,00
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota												
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Utilitas (PSU)	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategi	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Kawasan	1 Sistem Jaringan 100 persen	2.520.240.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>							<b>247.259.610.901</b>		-	-	-	<b>0,00</b>
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>							<b>247.259.610.901</b>		-	-	-	<b>0,00</b>
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan												
	Tingkat kemandapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemandapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	5 Dokumen	1.91 Indeks 58.26 Persen	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan												
	Tingkat kemandapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemandapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	30 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan												
	Tingkat kemandapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemandapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	6.5 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	1.740.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan												
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Panjang Jalan yang Dibangun	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	4 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	29.653.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan												
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	19 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	60.799.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan												
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	29.8 KM	1.91 Indeks 58.26 Persen	135.757.210.901	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan												
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	25 Meter	1.91 Indeks 58.26 Persen	245.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Indeks aksesibilitas	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.91 Indeks 58.26 Persen	60.5 Meter	1.91 Indeks 58.26 Persen	18.265.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>							<b>250.000.000,00</b>		-	-	-	<b>0,00</b>
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							250.000.000,00		-	-	-	0,00
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi									-	-	-	0,00
	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	-	-	-	0,00	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>							<b>4.331.465.570,00</b>		-	-	-	<b>0,00</b>
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>							<b>612.477.330,00</b>		-	-	-	<b>0,00</b>
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota												
	Persentase penyelesaian dokumen RTRW	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi RTRW dan RRTR	Kab. Nunukan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	612.477.330,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
<b>1.03.12.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>2.700.002.750,00</b>		-	-	-	<b>0,00</b>
1.03.12.2.	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota												



**PEMERINTAH KAB NUNUKAN**  
*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

KODE	INDIKATOR KINERJA			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
	CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
02.0005													
	Persentase penyelesaian dokumen RTRW	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.002.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.12.2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>501.570.790,00</b>		-	-	-	0,00
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang												
	Persentase penyelesaian dokumen RTRW	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	501.570.790,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
1.03.12.2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>517.414.700,00</b>		-	-	-	0,00
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang												
	Persentase penyelesaian dokumen RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	517.414.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00



# BAB V

## Penutup

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Nunukan. Selain itu juga sebagai upaya pencapaian target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2026.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada Tahun Anggaran 2026, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan melaksanakan 12 (Dua Belas) program yaitu :
  1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).



3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
  4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.
  5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
  6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
  7. Program Pengembangan Permukiman.
  8. Program Penataan Bangunan Gedung.
  9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
  10. Program Penyelenggaraan Jalan.
  11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
  12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Dalam rangka menjamin terlaksananya prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana diuraikan diatas, serta untuk terwujudnya kinerja pembangunan daerah yang optimal, maka perlu diperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.
  - b. Dokumen Renja Tahun 2026 harus dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 yang merupakan hasil kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan DPRD Kabupaten Nunukan.
  - c. Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kabupaten Nunukan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2026.

- d. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026, berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), serta perlu dukungan dari segenap pemangku kepentingan.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Nunukan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun dengan OPD yang membidangi urusan dan fungsi lain.

Demikian Rancangan akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bagian Kebijakan Umum APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.

Nunukan, 01 Juli 2025

Kepala Dinas,



**ABDI JAUHARI N., ST.**

Pembina Utama Muda IV/c  
NIP.19780430 200112 1 003